

## ABSTRACT

This thesis is entitled "**The View of the Padang City Islamic Organizations Against Women's Participation in the Politics of the Jurisprudence Perspective of Siyasah**", compiled by **Kilat Terbayang BP. 1313040576**, Jinayah Siyasah Department, Faculty of Shariah.

The background of this research is that there are several opinions regarding the right to hold positions in the executive field for women of different opinions, there are some opinions that allow, some are prohibited, even forbid altogether, which argues that women are not eligible to hold positions in politics. The formulation of the problem in this study is how the views of the Padang City Islamic mass organization on women's participation in the politics of fiqh siyasah perspective. This type of research is field research. The data collection techniques in this study are using interview techniques. Then the data that has been collected is processed and analyzed and presented in the form of research reports (thesis) that are descriptive analysis. Based on the results of the study it can be concluded that legally the leaders of Muhammadiyah organizations consider that the involvement of women in politics is a legitimate thing but the ability of women involved in politics must always pay attention to their nature as a woman. In the face of Padang's Islamic Tarbiyah Association, there are two opinions about women's participation in politics. Perti community leaders who support and agree on women participating in politics with reasons in Islamic law are permissible, in accordance with their abilities and should not ignore their nature as women. While some figures from the mass organization Perti refused women to participate in any political activities to become leaders by relying on verse 34 of the an-Nisa and the hadith narrated by Imam Bukhori because in the Islamic Shari'a the issue of leadership was an easy matter. The ability of women to participate actively in the political world according to the figures of the NU mass organization in Padang City must be on the condition that their involvement does not conflict with legal provisions or religious norms. The view of Padang's Islamic organizations about women's participation in politics in fiqh siyasah is essentially no prohibition in Islam, even the views of the ulamas of the three Islamic organizations are in line with the fiqh of siyasah which allows women to be active in politics as long as they pay attention to their nature, if a woman is unable to pay attention to her nature as a woman, the woman cannot go into politics even history records many women who play an active role both during the prophet's time and with friends.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Pandangan Ormas Islam Kota Padang Terhadap Keikutsertaan Perempuan Dalam Politik Perspektif Fikih Siyasah”**, disusun oleh **Kilat Terbayang BP. 1313040576**, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya masalah yang mengenai hak untuk menduduki jabatan dibidang eksekutif bagi perempuan para ulama berbeda pendapat ada beberapa pendapat yang membolehkan, ada juga yang melarang, bahkan mengharamkan sama sekali, yang berpendapat bahwa perempuan tidak layak menduduki jabatan dalam bidang politik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan ormas Islam Kota Padang terhadap keikutsertaan perempuan dalam politik perspektif fikih siyasah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara. Kemudian data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian (skripsi) yang bersifat diskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa secara hukum tokoh ormas Muhammadiyah memandang bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah hal yang sah tetapi kebolehan perempuan terlibat dalam dunia politik harus senantiasa memperhatikan kodratnya sebagai seorang perempuan. Pandangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kota Padang terhadap keikutsertaan perempuan dalam politik terdapat dua pendapat. Tokoh ormas Perti yang mendukung dan setuju perempuan ikut serta dalam berpolitik dengan alasan dalam hukum Islam adalah hal yang dibolehkan, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan tidak boleh mengabaikan kodratnya sebagai perempuan. Sedangkan beberapa tokoh dari ormas Perti menolak perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan berpolitik apa lagi menjadi pemimpin dengan menyandarkan surat an-Nisa ayat 34 serta hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dikarenakan dalam syariat Islam persoalan kepemimpinan ini merupakan persoalan yang tidak mudah. Kebolehan perempuan untuk ikut aktif dalam dunia politik menurut tokoh-tokoh ormas NU Kota Padang harus dengan persyaratan bahwa keterlibatannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau norma-norma agama. Pandangan ormas Islam Kota Padang tentang keikutsertaan perempuan berpolitik dalam fikih siyasah pada hakikatnya tidak ada larangan dalam Islam bahkan pandangan para ulama dari ketiga organisasi Islam tersebut sejalan dengan fikih siyasah yaitu memperbolehkan perempuan aktif dalam berpolitik asalkan tetap memperhatikan kodratnya, jika seorang perempuan tidak mampu memperhatikan kodratnya sebagai perempuan, maka perempuan tersebut tidak boleh terjun ke dunia politik bahkan sejarah mencatat banyak perempuan yang berperan aktif baik pada masa nabi maupun para sahabat.

**PANDANGAN ORMAS ISLAM KOTA PADANG TERHADAP  
KEIKUTSERTAAN PEREMPUAN DALAM POLITIK  
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Fakultas Syariah sebagai salah satu syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Jinayah Siyasa*



**Oleh**

**Kilat Terbayang  
1313040576**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
IMAM BONJOL PADANG  
1439 H / 2018 M**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Pandangan Ormas Islam Kota Padang Terhadap Keikutsertaan Perempuan Dalam Politik Perspektif Fikih Siyasah" adalah benar hasil karya saya, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari skripsi ataupun karya yang sudah dipublikasikan atau pernah digunakan untuk memperoleh gelar keserijanaan di UIN Imam Bonjol Padang ataupun di perguruan tinggi lainnya. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 15 Agustus 2018



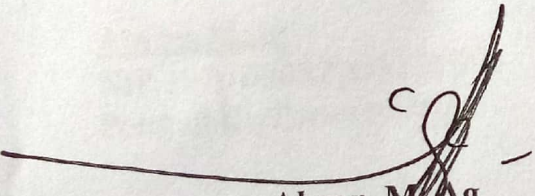
**Kifat Ferbayang**  
**NIM. 1313040576**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

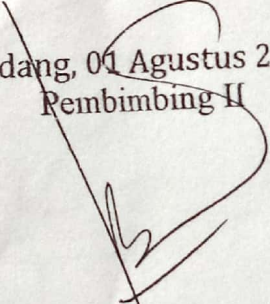
Skripsi dengan judul **Pandangan Ulama Kota Padang Terhadap Keikutsertaan Perempuan dalam Politik Perspektif Fikih Siyash.** yang telah disusun oleh saudara **Kilat Terbayang, NIM: 1313040576** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan pembimbing ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I

  
**Abrar, M. Ag**  
NIP: 19740806 200312 1002

Padang, 01 Agustus 2018  
Pembimbing II

  
**Dr. Tiswarni, M. Ag**  
NIP: 19780331 200312 2003

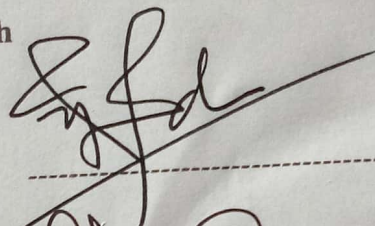
**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Skripsi ini berjudul "Pandangan Ormas Islam Kota Padang Terhadap Keikutsertaan Perempuan Dalam Politik Perspektif Fikih Siyasah", disusun oleh Kilat Terbayang BP. 1313040576, telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada Hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 dan telah memenuhi persyaratan ilmiah serta telah diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari tim Penguji Sidang Munaqasyah.

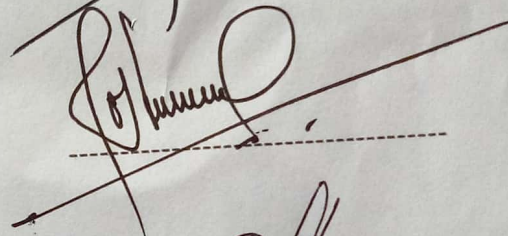
Disahkan di : Padang  
Tanggal : 03 September 2018

**Tim Penguji Sidang Munaqasyah**

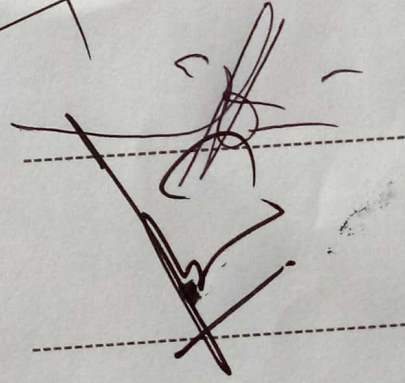
**Dr. Efrinaldi, M.Ag**  
NIP.197407191998031001  
Penguji I



**Supardi, S.Ag, MH**  
NIP.197503022009011008  
Penguji II

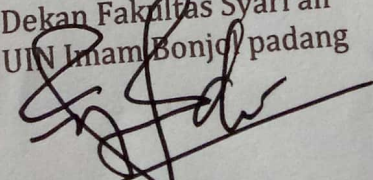


**Abrar, M.Ag**  
NIP.197408082003121002  
Penguji III/Pembimbing I



**Dr. Tiswarni, M.Ag**  
NIP.197803312003122003  
Penguji IV/Pembimbing II

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Imam Bonjol Padang



**Dr. Efrinaldi, M.Ag**  
NIP. 197407191998031001